

BAB V

KESIMPULAN

Gerakan Dewan Banteng meledak pada tanggal 15 Februari 1958 dengan diumumkannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai wujud protes atau koreksi Sumatera Tengah terhadap pemerintah pusat yang sebelumnya sudah diberi ultimatum oleh Dewan Banteng. Ultimatum tersebut ditujukan untuk memprotes kebijakan-kebijakan pusat yang sudah tidak sesuai dengan jalurnya. Masalah reorganisasi tentara, otonomi daerah dan ketimpangan pembangunan antara daerah dengan pusat menjadi faktor utama munculnya aksi Dewan Banteng tersebut. Namun, pada kenyataannya pemerintah pusat menjawab ultimatum tersebut dengan mengirim pasukan APRI ke Sumatera Tengah melalui serangan darat, laut dan udara. Dewan Banteng dianggap telah mengancam keutuhan NKRI oleh pemerintah pusat.

Pada peristiwa ini tentara PRRI mengalami kekalahan dalam waktu yang singkat. Tentara pusat mampu menduduki pos-pos penting PRRI hanya dalam waktu beberapa hari, akhirnya para tentara PRRI menyerah dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Keadaan pasca perang tidak aman, maka untuk memulihkan keamanan pemerintah pusat membentuk operasi pengamanan di wilayah Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Utara.

Sandi operasi pemulihan keamanan untuk daerah Sumatera Barat dinamakan Operasi 17 Agustus, yang mana menjadi cikal bakal terbentuknya Kodam 17 Agustus yang terbentuk tanggal 15 April 1959 bermarkas di Padang. Kemudian pada tahun 1961 berubah nama menjadi Kodam III/17 Agustus. Pada

saat itu Kodam III/17 Agustus memiliki 3 unsur satuan teritorial setingkat Komando Resor Militer (Korem) dan 5 unsur satuan tempur.

Namun, mengingat kondisi masyarakat pasca perang yang mengemban beban mental sebagai dampak trauma terhadap perang, ekonomi masyarakat saat itu juga merosot tajam. Hal ini dikarenakan infrastruktur fisik di Sumatera Barat khususnya banyak yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat menunjang berjalannya perekonomian masyarakat seperti biasanya. Kodam mulai melakukan upaya demi mendobrak perekonomian masyarakat kembali dengan menerapkan sistem *Civic Mission*, dimana tentara turut membantu pekerjaan sipil dalam membantu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Kodam III/17 Agustus juga membentuk Koordinasi Pembangunan Daerah (KPD) Sumatera Barat. KPD dan Kodam III/17 Agustus melakukan karya baktinya terhadap masyarakat dengan membangun irigasi, jalan dan jembatan, rehabilitasi desa-desa, sekolah-sekolah dan perbaikan terhadap infrastruktur fisik lainnya yang mampu membangkitkan perekonomian masyarakat kembali. Namun, pada masa itu Kodam memiliki unsur satuan zeni tempur untuk dapat melakukan tugas-tugas tersebut dengan cepat tanggap. Maka Kodam meminta pasukan zeni dari Pulau Jawa untuk bertugas di Sumatera Barat dan Riau.

Mengingat akan hal itu Kasad memberi perintah untuk segera membentuk satuan zeni tempur yang organik terhadap Kodam III/17 Agustus agar dapat mendukung tugas-tugas pokok kodam. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam keadaan yang serba darurat, akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1966

dibentuklah satuan zeni tempur setingkat detasemen yang diberi nama Detasemen Zeni Tempur 2/Prasada Sakti yang biasa disingkat Denzipur 2/Prasada Sakti dibawah jajaran Kodam III/17 Agustus. Pada tahun 1983 ketika terjadi penglikuidasian komando pengendalian, Denzipur 2/Prasada Sakti langsung dibawah komando Kodam I/Bukit Barisan yang bermarkas di Medan.

Sejak berdirinya satuan tahun 1966, meskipun dalam keadaan serba darurat dengan logistik yang seadanya dan belum memiliki markas komando pasukan Denzipur 2/Prasada Sakti sudah melakukan darma baktinya terhadap masyarakat Sumatera Barat dan Riau. Berbekal alat berat zeni yang diperoleh satuan ketika melakukan serah terima tugas dari Yonzikon 7 yang akan kembali ke Pulau Jawa untuk Operasi Dwikora, Denzipur 2/Prasada Sakti melanjutkan tugas pembangunan bandar udara Simpang Tiga Pekanbaru serta melakukan pengecekan jembatan ponton proyek dari PT. Waskita Karya selama lebih kurang 3 tahun.

Pada saat lokasi markas satuan telah ditentukan, yaitu di Padang Mengatas, di Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota barulah keluarga personil diberangkatkan ke Payakumbuh. Sementara waktu sebelum didirikannya asrama satuan personil beserta menginap di rumah-rumah masyarakat. Kemudian, untuk awal mendirikan asrama, personil beserta keluarga berjuang sendiri untuk membangun asrama satuan, yang mana pada masa awal itu mereka tinggal di asrama berdinding anyaman bambu dan beratap daun rumbio.

Pada awal mula berdirinya satuan, faktor budaya seperti bahasa dan makanan menjadi kendala personil satuan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian sisi lain, sebagaimana keadaan pada pasca PRRI tersebut bahwa masyarakat masih sangat takut dengan tentara, terutama masyarakat Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota tempat didirikannya markas satuan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang dialami oleh Denzipur 2/Prasada Sakti di dalam lingkungan masyarakat pasca PRRI, di tambah lagi oleh kenyataan bahwa personil satuan pada masa itu banyak yang berasal dari daerah Palembang dan Jawa. Masyarakat menganggap tentara-tentara asal Palembang tersebut banyak yang kasar dan tidak segan melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat sekitar satuan.

Akan tetapi, selama kurun waktu 1970-an tersebut dimana pembangunan asrama dan markas komando sedang giat dilaksanakan secara swadaya, personil tidak melupakan tugas mereka untuk melakukan karya bakti terhadap masyarakat Sumatera Barat yang membutuhkan pemulihan infrastruktur fisik kembali. Bekal keahlian berbeda setiap personil sesuai struktur organisasi satuan yang diatur oleh Kasad di bidang zeni ini membuat keahlian mereka tersebut sangat berguna bagi pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangunan atau pelebaran jalan, pemasangan jembatan bailley yang merupakan sejenis jembatan penyebrangan TNI-AD yang hanya mampu di pasang oleh tentara zeni, pembuatan jembatan gantung, pembangunan irigasi, membantu penanggulangan bencana alam dengan cepat dan pembangunan fasilitas umum yang dirasa perlu oleh masyarakat.

Hal ini bertujuan untuk melancarkan program kemanusiaan yang dibentuk oleh Kodam dalam membangkitkan ekonomi masyarakat kembali. Tidak ada kendala spesifik yang dialami personil dengan masyarakat dalam melakukan tugasnya di berbagai daerah Sumatera Barat selain kesulitan-kesulitan untuk mencapai daerah sasaran tugas Bakti TNI tersebut, karena tugas Bakti TNI ini ada yang berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah dan perangkat daerah tersebut yang memperkenalkan personil kepada masyarakat dan ada Bakti TNI yang dilakukan atas inisiatif satuan. Biasanya kegiatan Bakti TNI ini tidak melibatkan masyarakat dalam kegiatannya. Namun, potret lain dalam struktur kepemimpinan organisasi satuan Denzipur 2/Prasada Sakti justru menimbulkan suatu kecemburuan sosial antara personil yang berasal dari Pulau Jawa dengan personil yang berasal dari Palembang. Masa itu awal berkembangnya satuan hingga Orde Baru, personil asal Palembang merasa dianak-tirikan oleh komandan satuan itu sendiri, yang mana kursi jabatan komandan ini selalu diisi oleh perwira-perwira asal Pulau Jawa dan atas segala sesuatu yang terjadi dalam struktur organisasi satuan baik itu berupa gaji, kesejahteraan keluarga, maupun pendidikan, komandan satuan lebih memperhatikan personil-personil asal Pulau Jawa. Jadi, sifat buruk menjilat pemimpin pada masa itu menyebabkan kecemburuan sosial dari personil-personil asal Palembang.

Pada tahun 1980, pemerintah rezim Orde Baru bersama jajaran ABRI mencanangkan suatu program pembangunan yang menjadikan militer sebagai aktor utama dalam mewujudkan program tersebut. Program ini disebut ABRI Masuk Desa, yang biasa disebut AMD. Program AMD, dimaksudkan untuk

menghimpun kekuatan dasar untuk bela negara pada masyarakat pedesaan, karena pada dasarnya penduduk Indonesia tinggal di desa. ABRI yang masa itu menjunjung tinggi konsep Dwifungsi ABRI, yang mana ABRI tidak hanya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga diperbolehkan untuk bermain di panggung sosial politik.

Militer dianggap sebagai stabilisator dan dinamisator, ABRI diharapkan dapat menghimpun kekuatan dari masyarakat dalam hal bela negara dan memajukan pembangunan negara. Oleh karena itu, melalui program ABRI Masuk Desa diharapkan ABRI dapat membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi keterbatasan anggaran dana pembangunan daerahnya dengan melakukan program tersebut diberbagai daerah terisolir di seluruh Indonesia. Program AMD secara serentak mulai dilaksanakan diseluruh penjuru Indonesia sejak tahun 1980.

Program AMD dilakukan selama 21 hari didaerah yang menjadi sasaran program dengan tim pelaksananya adalah Kodim, yang dibantu oleh unsur TNI-AL, TNI-AU, pasukan Yonif dan pasukan Zeni Tempur serta perangkat pemerintah daerah. Pada masa Orde Baru kegiatan AMD ini bisa dilakukan tiga hingga empat kali dalam setahun. Sebelum dilakukannya kegiatan ada pra-AMD, dimana Komandan Kodim (Dandim) selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) beserta jajarannya perlu melakukan peninjauan ke lokasi sasaran kegiatan, untuk melihat apa saja yang perlu dibangun di daerah tersebut. Kemudian, pembangunan sasaran fisik akan disesuaikan dengan anggaran dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Program AMD dapat dikatakan suatu program untuk menarik simpati masyarakat agar turut berpartisipasi dalam membangun daerahnya. Kegiatan ini sengaja melibatkan tenaga masyarakat, hal ini untuk membangkitkan tradisi gotong royong dalam diri masyarakat. Pada masa Orde Baru itu, Sumatera Barat sendiri dalam program ini tidak sulit untuk mengundang inisiatif masyarakat untuk berperan aktif, karena kearifan lokal masyarakat yang sudah mengenal tradisi gotong royong sejak lama, dimana dikenal dengan sebutan Manunggal Sakato. Manunggal Sakato awalnya bertujuan untuk membangun masyarakat miskin, misalnya dengan membantu pembangunan rumah secara bergotong royong. Sumatera Barat, termasuk provinsi yang sukses dalam melakukan pembangunan daerahnya selama Pelita yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Akan tetapi, pada penghujung dekade 90-an Indonesia dihadapkan dengan krisis moneter yang membuat kehidupan masyarakat menjadi sangat sulit, dan memicu tindak kriminal dimana-mana. Negara memiliki hutang yang banyak pada negara lain sebagai dampak korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan para wakil rakyat yang memegang jabatan di gedung pemerintahan. Mahasiswa yang merupakan aktivis-aktivis muda bangsa mulai bergejolak dimana-mana menuntut agar jatuhnya kabinet pembangunan ini dan menuntut agar militer mundur dari kursi-kursi jabatan sipil.

Menjamurnya gerakan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dengan sebutan gerakan reformasi ini tidak dapat ditangkis lagi oleh militer dan pemerintah, membuat Presiden Soeharto segera mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Akhirnya rezim militer runtuh digantikan oleh era reformasi.

Gerakan reformasi menuntut agar Dwifungsi ABRI segera dihapuskan dan ABRI harus kembali ke barak sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.

Tuntutan tersebut disanggupi oleh militer dengan terus melakukan reformasi internal di tubuh ABRI itu sendiri dimulai dengan pemisahan TNI dan POLRI. TNI terus berbenah diri untuk mewujudkan profesionalisme. Meskipun Dwifungsi ABRI dihapuskan, namun kegiatan AMD di masa Orde Baru tetap dilaksanakan dengan tujuan murni untuk membantu pemerintah daerah untuk memecahkan persoalan keterbatasan dana anggaran pembangunan daerahnya, dengan adanya program manunggal ini dapat menghemat dana namun dapat dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan AMD berganti nama menjadi TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan kemudian disempurnakan dengan sebutan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat melihat adanya perbedaan program AMD dengan TMMD di masa kini yakni, dari segi tujuan dilaksanakan program tersebut. Program AMD dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat dan membangkitkan kembali citra ABRI di tengah masyarakat terkait atas kejadian di masa lalu yang dialami oleh masyarakat terutama masyarakat Sumatera Barat. Sedangkan, program TMMD di masa Reformasi dilakukan memang untuk membantu keterbatasan dana pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, hal ini terlihat bahwa TMMD dalam programnya melibatkan berbagai unsur departemen pemerintah maupun lembaga pemerintah non departemen.

Denzipur 2/Prasada Sakti sejak pada masa awal Orde Baru yang bertepatan dengan pasca peristiwa PRRI, di mana akses-akses transportasi penting perlu dibangun maupun diperbaiki kembali dengan cepat, untuk membantu aktivitas masyarakat dalam bidang perekonomian. Tenaga pasukan zeni sangat penting pada masa itu karena personil satuan Denzipur 2/Prasada Sakti merupakan satuan yang dibentuk untuk tugas khusus di bidang kemanusiaan disamping tugasnya dalam pertahanan dan keamanan, personil memiliki keahlian khusus di bidang zeni dan mampu bergerak cepat disaat kondisi darurat suatu wilayah, misalnya dalam upaya penanggulangan bencana alam.

Denzipur 2/Prasada Sakti dari Orde Baru hingga reformasi ini tetap masih aktif dalam mendukung kelancaran program Manunggal TNI-rakyat. Hampir pada setiap manunggal pasukan Denzipur 2/Prasada Sakti selalu dilibatkan setidaknya satu regu pasukan, apabila sasaran pembangunan fisiknya banyak maka bisa dikirim dalam tingkat peleton. Satuan zeni tempur merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan Manunggal TNI-rakyat, karena pada umumnya sasaran pembangunan fisik yang akan dicapai di daerah sasaran ialah seperti pembukaan akses jalan baru, pembangunan jembatan, pelebaran jalan atau sungai yang membutuhkan alat berat zeni dan keahlian khusus tenaga pasukan zeni itu sendiri. Oleh sebab itulah mengapa penulis mengangkat tema tentang peran Denzipur 2/Prasada Sakti ini dalam pembangunan infrastruktur fisik di Sumatera Barat ialah pada Operasi Bakti TNI berupa Manunggal TNI-rakyat. Manunggal TNI-rakyat ibarat batu loncatan yang terlihatnya sebagai bentuk kepedulian TNI pada umumnya terhadap masyarakat dan peran penting pasukan

zeni Denzipur 2/Prasada Sakti khususnya terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur fisik di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari tugas-tugas di bidang pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan satuan Denzipur 2/Prasada Sakti dalam tiga periode penting yaitu Sumatera Barat Pasca PRRI, tiga dekade bertahannya Orde Baru serta masa Reformasi saat ini.

